

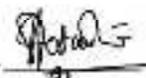
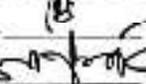
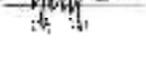
**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**MEDAN - INDONESIA**

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1)  
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4002/SK/BAN-PT/Ak-  
PND/S-VII/2022, Menyatakan Bahwa

Nama : Kukuh Omangego Harefa  
NPM : 20230310  
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu  
Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1).  
Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Dinyatakan LULUS.

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua           | : Dra. Natalia E.T. Sihombing, MSi |
| 2. Sekretaris      | : Dra. Artha Lamban Tobing, MSP    |
| 3. Penguji Utama   | : Dr. Dimpos Manalu, S.Sos., MSi   |
| 4. Anggota Penguji | : Dra. L. Primawati Degodona, MSP  |
| 5. Pembela         | : Vera A.R. Pasaribu, S.Sos., MSP  |

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Diketahui:

Dean



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini meneliti tentang kesenjangan gender pada fasilitas ruang publik yang cenderung menimbulkan ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan. Untuk itu, pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang menaruh perhatian terhadap isu gender pada fasilitas ruang publik. Pemerintah Kota Medan sendiri mewujudkan pengarusutamaan gender melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Menurut Perwal Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018, Pengarusutamaan Gender di Kota Medan yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Medan.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Medan dapat dilihat dari indeks pembangunan gendernya. Menurut Perwal Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018, Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan.

**Tabel 1.1**

Indeks Pembangunan Gender Kota Medan (2017-2022)

Tahun	Indeks Pembangunan Gender Kota Medan
2017	93,34 %
2018	93,98 %
2019	94,02 %
2020	94,00 %
2021	93,76 %
2022	93,85 %

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan (diolah 2017-2022)*

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Medan Tahun 2017-2022 berada pada angka 93,34%-94,02%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada angka 94,2%, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 pada angka 93,76%-93,85%. IPG Kota Medan memang masih berada di atas IPG Provinsi Sumatera Utara sesuai data yang disampaikan oleh Pejabat Gubernur Sumut, Hassanudin, yang tercatat 91,06% pada tahun 2022 dan sebelumnya 90,73% pada tahun 2021.

Penataan ruang publik di kawasan perkotaan seringkali mempunyai implikasi yang signifikan dalam hal pemenuhan kebutuhan gender. Ruang publik sebagai elemen fungsional di wilayah politis memikul status normatif sebuah organ yang jadi media pengartikulasian diri masyarakat sipil di dalam otoritas negara terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya (Habernas, 1989 : 106). Jenis ruang publik tersebut juga

berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Salah satu program penataan ruang publik kawasan perkotaan adalah penyediaan ruang terbuka hijau berupa taman.

Penyediaan ruang terbuka hijau berupa taman di Kota Medan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Menurut Perda tersebut, Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan merupakan salah satu kegiatan pembangunan wilayah berbasis lingkungan dan masyarakat yang berfungsi sebagai sirkulasi dan juga dapat menjadi ruang rekreasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan minat terhadap bagaimana penghijauan perkotaan tidak netral dihadapan kesenjangan gender yang sudah ada. Untuk itu, penyediaan ruang terbuka hijau harus menyediakan fasilitas yang bersifat inklusif serta dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum sebagaimana fungsinya yang dapat memwadahi kegiatan semua kelompok masyarakat.

Penelitian terkait ruang terbuka hijau sebagai bagian dari ruang publik telah banyak dilakukan dari berbagai bidang ilmu. Penelitian Landung Erasati, dkk., (2020), dalam penelitian yang berjudul *Penyediaan Fasilitas Responsif Gender Pada*

*Ruang Terbuka Publik di Kota Lama Semarang*, menyebutkan bahwa beberapa fasilitas publik di Kota Lama Semarang belum sepenuhnya mewadahi beberapa golongan pengguna seperti anak-anak, difabel, dan lansia. Selain itu, bila diamati secara umum tentang kelengkapan komponen fasilitas pendukung ruang terbuka publik, semua komponen cenderung sudah lengkap dan tersedia. Namun secara kualitas, perlu ada peningkatan penyediaan. Pemetaan kebutuhan, kesesuaian peletakan, dan peruntukan lokasi dengan aktivitas menjadi salah satu komponen prasyarat responsif gender. Khususnya dalam hal keterwakilan ketersediaan fasilitas berdasarkan kelompok masyarakat, agar dalam pembangunan kawasan dan penyediaan fasilitas publik, semua golongan dan kelompok masyarakat dapat terwadahi secara optimal, secara adil dan inklusif.

Pengelolaan ruang terbuka hijau berupa taman di Kota Medan ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (DPKPKPR) Kota Medan. Taman Ahmad Yani yang berlokasi di Jalan Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempromosikan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Taman ini diresmikan pada tanggal 26 November 2008 oleh Walikota Medan Drs.H. Afifuddin Lubis, M.Si dan Dirut PT. Telkom, Rinaldi Firmansyah. Taman yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan ini tidak dipungut biaya tiket masuk. Taman Ahmad Yani memiliki monumen bersejarah dengan suasana sejuk yang menyegarkan serta

dilengkapi fasilitas seperti jalur *jogging*, area bermain anak-anak, dan alat olahraga *outdoor*.

Penelitian ini menekankan pada pemahaman tentang fungsi ruang terbuka hijau sebagai ruang publik yang seharusnya bisa dinikmati oleh laki-laki dan perempuan sebagai pengguna fasilitas publik dengan menggunakan indikator Empat aspek PUG, 4 Prinsip gender infrastruktur “*Infrastructure for All*”, (Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan tahun 2013), dan Analisa elemen taman terhadap gender. Peneliti menaruh perhatian pada Taman Ahmad Yani Kota Medan, karena taman ini dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dan berstatus taman kota. Dimana, ruang terbuka hijau yang responsif gender sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Responsif Gender Pada Fasilitas Ruang Publik (Studi Kasus Taman Ahmad Yani Medan)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana tingkat responsif gender pada fasilitas ruang publik di Taman Ahmad Yani Medan?**”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk “Menganalisis tingkat responsif gender pada fasilitas ruang publik di Taman Ahmad Yani Medan, sebagai upaya mewujudkan fasilitas yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah serangkain atau kumpulan manfaat yang dihasilkan dari penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1) Bagi Peneliti

- a) Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah dipelajari selama dalam perkuliahan serta memperoleh wawasan baru melalui proses dan tahap penelitian.
- b) Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang fasilitas responsif gender dalam konteks ruang publik.
- c) Dapat digunakan sebagai referensi, sumber informasi, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- d) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kontribusi untuk menanamkan minat, motivasi, dan sikap mahasiswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

#### 2) Bagi Universitas

Mengembangkan materi pengajaran dan meningkatkan reputasi universitas sebagai institusi yang mendukung riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 3) Bagi Institusi Pemerintah

Dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian terkait fasilitas responsif gender pada ruang publik.

### 4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak mereka untuk menerima fasilitas yang responsif gender pada fasilitas-fasilitas ruang publik yang ada di lingkungan masyarakat. Ini dapat membantu meningkatkan kinerja pengelola fasilitas publik melalui rekomendasi kebijakan, program, dan kebutuhan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gender**

##### **2.1.1 Konsep Gender**

Gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan ini mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Gender dapat berlangsung di dalam masyarakat karena terdapat dukungan dari sistem kepercayaan gender (*gender belief system*) (Deaux dan Kite dalam Partini, 2013). Kartini & Maulana (2019) dalam Siti Komariah dan Puspita Wulandari (2023:16), menyatakan bahwa:

Kata “Gender” merujuk pada perbedaan dalam peran, fungsi, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang timbul sebagai akibat dari pengaruh sosial dan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilah ini diperkenalkan oleh para ahli sosial untuk menjelaskan perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan sebagai penciptaan Tuhan, serta perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Memahami perbedaan ini memiliki pentingnya sendiri, mengingat bahwa selama ini seringkali terjadi penyelewengan antara karakteristik kodrati dan karakteristik yang bersifat hasil dari budaya.

Deaux dan Kite dalam Partini (2013) menyebutkan bahwa gender adalah bangunan sosial dan kultural, yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminim. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya tersebut menciptakan konsep gender di masyarakat.

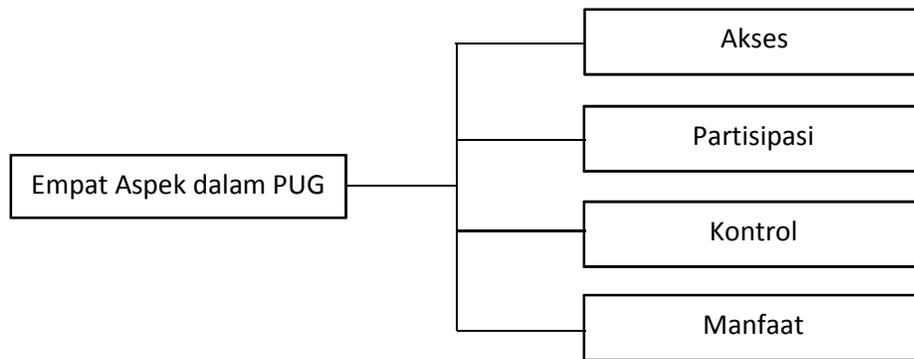
### **2.1.2 Pengarusutamaan Gender**

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Pengarusutamaan Gender di Kota Medan yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Medan.

Suharjuddin, 2020:5, menyatakan bahwa

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.

Dalam strategi pengarusutamaan gender terdapat empat aspek yang menjadi perhatian penting yaitu: 1) Akses, kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan, 2) Kontrol, peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan, 3) Partisipasi, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan/program, 4) Manfaat, peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/program/kegiatan.



**Gambar 2.1** Empat Aspek dalam PUG  
*Sumber: (Supiandi,2016)*

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender juga diperlukan prasyarat tertentu yaitu adanya kondisi awal dan keluaran-keluaran yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prasyarat awal dimaksud yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumberdaya yang ada, data terpilah berdasarkan seks, alat, dan peran serta masyarakat madani. Tujuan dari pelaksanaan PUG adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan.

### **2.1.3 Responsivitas Gender Pada Fasilitas Publik**

Responsif gender dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kesetaraan dan keadilan gender yang telah mencerminkan pengintegrasian perspektif gender untuk selanjutnya dirumuskan menjadi cara-cara antisipatif jika ditemukan ada isu-isu gender yang ditemukan di masyarakat. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

untuk Pemerintah Daerah, responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.

Dalam Riset *Gender Impact Assessment*, Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan tahun 2013 yang dikutip oleh Setyawati, Baby Dipokusumo (2018) terdapat 4 prinsip gender infrastruktur "*Infrastructure for All*" adalah sebagai berikut:

1. *Universal utilization*, dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (Lansia, Difabel, Anak-anak) sesuai dengan kebutuhan.
2. *Safety, Security, Convenience*, memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan).
3. *Gender Equity for Basic Needs*, memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar laki-laki dan perempuan, lansia, difabel, anak-anak, *safety, security, health (human needs)*.
4. *Environmental Friendly*, dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

Responsivitas gender pada fasilitas umum merupakan gambaran atau kondisi suatu fasilitas umum yang sudah responsif dengan kebutuhan gender laki-laki dan

perempuan. Responsif gender dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kesetaraan dan keadilan gender yang telah mencerminkan pengintegrasian perspektif gender untuk selanjutnya dirumuskan menjadi cara-cara antisipatif jika ditemukan ada isu-isu gender yang ditemukan di masyarakat.

## **2.2 Ruang Publik**

### **2.2.1 Definisi Ruang Publik**

Pengertian ruang publik merujuk pada ruang yang berfungsi untuk menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok atau komunitas. Pentingnya kebutuhan akan ruang publik sangat berpengaruh terhadap tipologi ruang kota yang direncanakan. Berdasarkan pelingkupannya (Carmona, et al., 2003, p.111) dalam Siregar (2012), ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi antara lain:

1. *External public space*. Ruang publik jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya.
2. *Internal public space*. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya.
3. *External and internal “quasi” public space*. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan

atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya.

Berdasarkan fungsinya secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tipologi (Carmona, et al: 2008, p.62) dalam Siregar (2012), antara lain:

1. *Positive space*

Ruang ini berupa ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya positif dan biasanya dikelola oleh pemerintah. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang alami/semi alami, ruang publik dan ruang terbuka publik.

2. *Negative space*

Ruang ini berupa ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kegiatan publik secara optimal karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas sosial serta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang pergerakan, ruang servis dan ruang-ruang yang ditinggalkan karena kurang baiknya proses perencanaan.

3. *Ambiguous space*

Ruang ini adalah ruang yang dipergunakan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama warga yang biasanya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, cafe, rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya.

4. *Private space*

Ruang ini berupa ruang yang dimiliki secara privat oleh warga yang biasanya berbentuk ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang di dalam bangunan.

### **2.2.3 Nilai-Nilai Ruang Publik**

Nilai-nilai ruang publik berfungsi sebagai tolak ukur kualitas ruang publik. (Carr dalam public space, 1995) secara tegas menyebutkan beberapa tolak ukur dalam menilai kualitas ruang publik yang didasarkan atas tiga aspek yaitu *needs, rights, dan meanings*. Tolak ukur ruang publik yang berkualitas adalah ruang publik yang mampu merespon kebutuhan (*support the needs*), melindungi hak pengguna (*protect the rights*) dan makna (*meanings*), atau dengan kata lain tolak ukur yang berkualitas adalah tingkat responsive terhadap kebutuhan (*needs*), tingkat *democraticity* dalam melindungi hak pengguna (*rights*) dan tingkat *meaningfully*.

#### *1. Responsive*

Ruang publik yang responsif adalah ruang yang diciptakan dan diatur untuk melayani kebutuhan penggunanya. Kebutuhan yang mendasar adalah seseorang mencari kepuasan dalam *public space* untuk kenyamanan, santai, keterkaitan secara aktif dan pasif serta adanya penemuan pengalaman baru.

#### *2. Democratic*

Ruang publik yang demokratis (*democratic space*) adalah ruang publik yang dapat melindungi hak-hak kelompok penggunanya.

#### *3. Meaningful*

Ruang yang *meaningful* adalah ruang yang memberikan suatu hubungan yang kuat antara ruang (*place*), kehidupan pribadi dan dunia yang lebih luas. Keduanya dihubungkan oleh konteks fisik dan kualitas sosial. Hubungan ini dapat menjadi sejarah bagi suatu kelompok masyarakat tertentu dan masa depan kelompok tertentu pula. Dengan demikian makna mempunyai keterkaitan dengan aspek sejarah, budaya, kondisi biologis dan psikologis serta dunia yang lebih luas.

Salah satu nilai ruang publik yang harus dijaga adalah terpenuhinya akses bagi semua kelompok masyarakat, termasuk bagi laki-laki dan perempuan. Sebuah ruang publik yang secara *eo ipso* masih menyisihkan kelompok-kelompok tertentu, dan karena itu dapat dikatakan belum sempurna, bukanlah ruang publik sama sekali (Habermas, 1989 : 121).

## **2.3 Ruang Terbuka Hijau Perkotaan**

### **2.3.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di daerah perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,

Ruang terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042, dijelaskan bahwa perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota Medan.

Penyediaan RTH harus mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042, ruang terbuka hijau terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, dan Pemakaman.

### **2.3.2 Tipologi Ruang Terbuka Hijau**

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman, pembagian jenis-jenis ruang terbuka hijau yang ada sesuai dengan tipologinya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2** Tipologi RTH

*Sumber:* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008.

### 2.3.3 Taman Kota

Taman merupakan areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan baik yang ada secara alami maupun taman buatan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman kota dikategorikan sebagai RTH publik karena dapat diakses oleh semua masyarakat dan tidak dibatasi oleh kalangan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, taman kota harus mampu mengakomodasi kebutuhan setiap masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan dengan berbagai kemampuan terutama dalam menjalankan fungsi sosial. Dalam pengelolaan taman kota, menyediakan ruang hijau yang dapat memberikan kesejukan dengan vegetasi berupa pohon dan tanaman lainnya. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau atau ruang publik berupa lahan terbuka yang ditata sedemikian rupa atau hasil rekayasa manusia sehingga memberikan rasa dan estetika sebagai sarana rekreasi, edukasi dan kegiatan lainnya di tingkat kota yang dikelola oleh pemerintah kota. Sebagai ruang publik, taman kota harus didesain agar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.

### **2.3.4 Taman Kota Sebagai Ruang Publik Responsif Gender**

Taman kota yang responsif gender dapat diamati dari pemenuhan kriteria-kriteria elemen taman yang responsif gender. Menurut buku *Public Space*, Stephen Carr (1992) menyatakan bahwa ruang publik perlu bersifat bermakna, responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan demokratis kepada semua orang. Ruang publik yang bermakna adalah ruang publik yang mampu menjalin pertautan dengan manusia dan dunia luas dengan semua konteks sosialnya. Ruang publik yang responsif adalah ruang yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dan mencakup semua segmen. Sedangkan demokratis adalah ruang publik yang dapat dimanfaatkan semua unsur masyarakat umum tanpa dibeda-bedakan meskipun adanya perbedaan budaya, sosial, dan tingkat ekonomi. Selain itu, unsur demokratis perlu dipenuhi ruang publik supaya ruang tersebut dapat dijangkau (aksesibel) oleh semua masyarakat bagaimanapun kondisi fisiknya.

Carmona (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar aktivitas pengguna dengan ruang terbuka publik yaitu:

1. *Comfort*, yaitu kenyamanan, adalah salah satu faktor penting pada penggunaan ruang publik. Durasi waktu keberadaan pengunjung di ruang publik merupakan indikator dari kenyamanan ruang publik tersebut. Faktor kenyamanan lingkungan seperti terhindar dari suhu yang tidak nyaman dari matahari (suhu yang terlalu panas), angin yang terlalu kencang dan dingin. Kenyamanan fisik yaitu tersedianya tempat duduk yang nyaman, fasilitas

yang tersedia, dan kenyamanan dalam bersosialisasi dan psikologis. Selain itu Kenyamanan ini juga tergantung dari karakter dan kualitas dari ruang tersebut. Carr (1992) menyatakan kebutuhan penting untuk memperluas pengalaman pengunjung dalam ruang publik dengan rasa aman, dimana seseorang tidak merasa was-was, sedangkan rasa nyaman bisa dipengaruhi oleh desain fisik ruang tersebut yang ditujukan sebagai bagian dari strategi pemasaran.

2. *Relaxation*, yaitu relaksasi berorientasi pada bagaimana tenangnya fisik badan serta pikiran dari si pengunjung (Carr, 1992). Keberadaan, elemen alam seperti vegetasi, unsur air, dan pembatas yang berfungsi membatasi bagian dalam ruang publik dengan jalan sehingga pengunjung bisa mudah untuk berelaksasi. Relaksasi selain meredakan ketegangan secara psikis, juga bisa menyembuhkan kondisi fisik seseorang (Setiadarma, 2000)
3. *Passive engagement*, yaitu pengguna ruang publik menggunakan ruang publik secara pasif yang dilakukan berupa kegiatan mengamati lingkungan. Ruang publik secara setting tempat harus memungkinkan pengguna untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk menikmati suasana sekitar yang didukung oleh elemen lansekap yang representatif.
4. *Active engagement*, terjadi dalam bentuk aktivitas yang melibatkan pengguna secara langsung. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk komunikasi antar pengguna terjadi secara spontan dikarenakan adanya sesuatu yang menarik.

5. *Discovery*, yaitu suatu pengalaman ruang yang berbeda-beda, sehingga orang akan lebih tertarik untuk mengunjungi suatu ruang publik. Pengalaman ruang ini diwujudkan dari desain lansekap yang unik, pertunjukan kesenian, *view* panorama alami yang menarik, dan adanya kios yang menjual barang atau makanan.

Ruang personal terbentuk dari suatu area yang membatasi dan yang mengelilingi diri seseorang sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya (Laurens, 2004). Jika diibaratkan ruang personal seperti penutup yang menyelubungi seseorang, membatasi jarak dengan orang lain dan penutup itu dapat melebar atau menyempit tergantung dengan siapa orang tersebut berhadapan berdasarkan pada seberapa dekat sifat hubungan individu dengan individu lainnya. Hall (1963 dalam Laurens 2004) menyatakan ruang personal adalah suatu jarak dalam berkomunikasi, dimana jarak antar individu ini adalah juga adalah jarak berkomunikasi. Pengendalian terhadap gangguan yang mungkin diterima direspon manusia dengan mengatur jarak personalnya dengan pihak lain.

Teritorialitas adalah perwujudan ego dari seseorang karena dia tidak ingin diganggu, atau bisa disebut sebagai perwujudan dari privasi seseorang.

Edney (1974) dalam Laurens (2004), menyatakan bahwa:

Teritorialitas berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi, dan identitas, serta termasuk juga di dalamnya berupa dominasi, kontrol, konflik, keamanan, gugatan dari sesuatu dan pertahanan. Ruang personal dibedakan dengan teritorialitas pada posisinya, dimana teritorialitas adalah suatu tempat yang nyata, relatif tetap, dan tidak

berpindah tempat mengikuti gerakan individu yang bersangkutan, sedangkan ruang personal bersifat sebaliknya.

Berangkat dari pemaparan konteks taman kota sebagai ruang publik yang responsif gender tersebut di atas, maka terdapat kriteria-kriteria yang menjadi lebih spesifik terhadap responsif gender pada ruang publik berupa akses, responsif, demokratis, bermakna, teritori, privasi, keamanan, relaksasi, dan ruang personal, yang oleh Muhammad Lufika Tondi, dkk., (2022) dalam penelitian terdahulu tentang Studi Elemen Ruang Terbuka Publik Terhadap Responsif Gender (Studi Kasus Koridor Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang) didesain berdasarkan kriteria-kriteria ruang terbuka publik yang lebih spesifik terhadap responsif gender dan digunakan untuk menganalisis apakah elemen taman pada koridor Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang telah sesuai dengan kriteria responsif gender. Analisa elemen taman terhadap gender pada penelitian terdahulu tersebut dibuat dalam model tabel yang dicantumkan di bawah ini.

**Tabel 2.1** Analisa Elemen Taman Terhadap Gender

Elemen	Kriteria	Ketersediaan (Ada/belum)	Analisis Responsif Gender
Taman	Akses		
	Responsif		
	Demokratis		
	Bermakna		
	Teritori		
	Privasi		
	Keamanan		
	Relaksasi		
	Ruang personal		

Sumber: Analisa, 2020

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu peneliti memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Teori-teori atau temuan dari penelitian sebelumnya merupakan dasar yang sangat

penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

**Tabel 2.2**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Landung Erasati, Khadifa Erning Ariyanti, Marsella DwiPutri (2020)	Penyediaan Fasilitas Responsif Gender Pada Ruang Terbuka Publik di KotaLama Semarang	Metode Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa beberapa fasilitas publik pada ruang terbuka publik di Kota Lama Semarang belum sepenuhnya mewadahi beberapa golongan pengguna seperti <i>pedestrian</i> yang dinilai kurang aman bagi pejalan kaki terutama bagi anak-anakdan lansia, taman aktif masihbelum dapat diakses beberapa golongan seperti difabel dan lansia, taman aktif yang belum mewadahi aktivitas rekreasi anak-anak, belum tersedianya fasilitas umum seperti toilet untuk difabel dan tempat ibadah.
2	Muhammad Lufika Tondi, Tri Woro Setiati (2022)	Studi Elemen Ruang Terbuka Publik	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan koridor jalan Jenderal

		Terhadap Responsif Gender (Studi Kasus Koridor Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang)		Sudirman Palembang belum sepenuhnya merespon kebutuhan gender khususnya perempuan. Dalam implementasinya
3	Suhartono, Fauzi Mizan Prabowo Aji (2023)	Identifikasi Kualitas Fisik Alun-alun Karanganya r Sebagai Ruang Terbuka Publik Responsif	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	pemanfaatan ruang di alun-alun Karanganyar juga cukup memadai terutama pada area terbuka dengan aktivitas sosial yang tinggi. Nilai-nilai responsif yang meliputi aspek kenyamanan, relaksasi, kegiatan pasif dan kegiatan aktif sudah memenuhi atau tanggap terhadap beragam aktivitas yang diwadahi. Akan tetapi kualitas fisik pada beberapa fasilitas masih perawatan agar berfungsi secara maksimal, seperti kelengkapan handrail pada ramp, pelandaian pedestrian yang masih curam, dan toilet yang belum memenuhi standar. Masih ditemukan beberapa kekeliruan dalam pemanfaatan ruang seperti area pedestrian yang digunakan untuk

				duduk dibandingkan menggunakan kursi taman. Nilai-nilai responsif pada aspek kenyamanan khususnya keamanan pada alun-alun masih kurang memadai pada area bermain anak yang juga merupakan plaza. diperlukan perbaikan dan
--	--	--	--	---

Dari kelima hasil penelitian yang terdahulu yang telah dikaji disebutkan di atas, maka dapat ditinjau persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Berikut adalah uraian persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini:

- Penelitian Landung Erasati, Khadifa Erning Ariyanti, Marsella Dwi Putri (2020) tentang Penyediaan Fasilitas Responsif Gender Pada Ruang Terbuka Publik di Kota Lama Semarang.
  - Persamaan
 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang fasilitas responsif gender pada ruang publik.
  - Perbedaan
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sementara penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat

perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian ini meneliti ruang terbuka publik di Kota Lama Semarang, sementara penelitian saat ini meneliti ruang terbuka hijau di Taman Ahmad Yani Medan.

- Penelitian Muhammad Lufika Tondi, Tri Woro Setiati (2022) tentang Studi Elemen Ruang Terbuka Publik Terhadap Responsif Gender (Studi Kasus Koridor Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang).

- Persamaan

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama berkaitan dengan konsep responsif gender.

- Perbedaan

Penelitian ini meneliti tentang studi elemen ruang terbuka publik dengan studi kasus pada koridor Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang. Sementara, penelitian saat ini melakukan penelitian pada ruang terbuka hijau di Taman Ahmad Yani Medan.

- Suhartono, Fauzi Mizan Prabowo Aji (2023) tentang Identifikasi Kualitas Fisik Alun-alun Karanganyar Sebagai Ruang Terbuka Publik Responsif.

- Persamaan

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama berusaha meneliti ruang publik yang responsif.

- Perbedaan

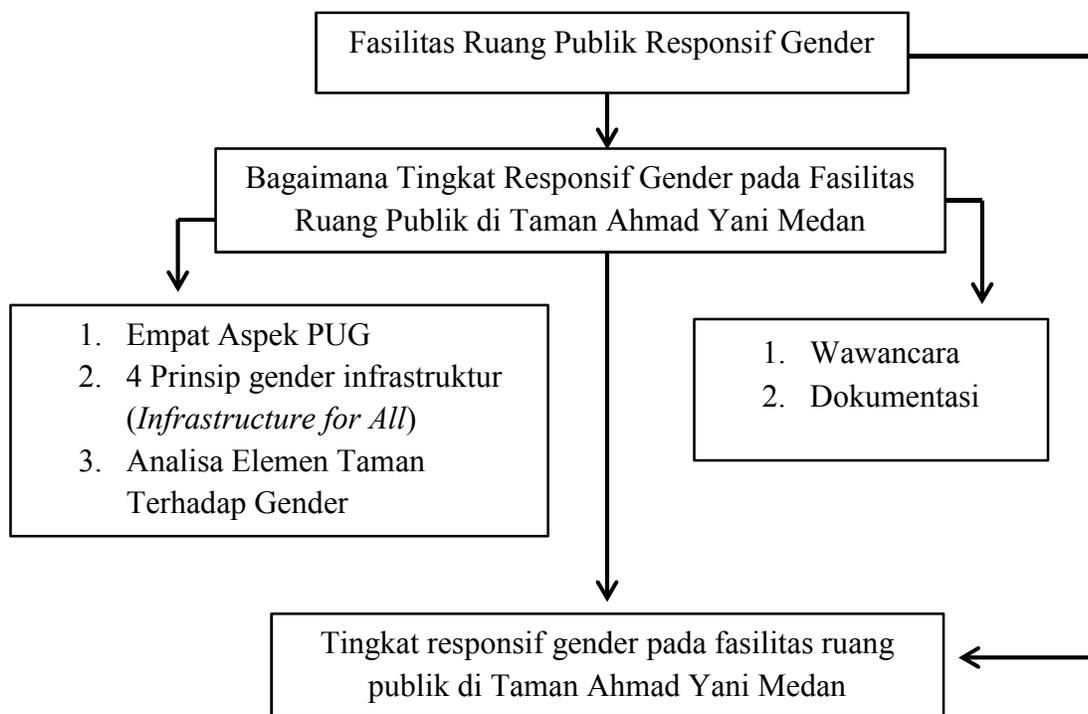
Terdapat perbedaan lokasi penelitian dan variabel penelitian, dimana penelitian ini meneliti tentang Identifikasi Kualitas Fisik Alun-alun Karanganyar Sebagai Ruang Terbuka Publik Responsif. Sementara, penelitian saat ini meneliti tentang Analisis Tingkat Responsif Gender pada Fasilitas Ruang Publik di Taman Ahmad Yani Medan.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, akan tetapi penelitian tersebut di atas sangat membantu peneliti saat ini untuk memperluas referensi dan menjadi pedoman alur berpikir dalam melakukan penelitian ini.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang juga biasa disebut sebagai kerangka konseptual adalah suatu dasar untuk berpikir yang mencakup kombinasi teori, fakta, observasi, dan penelitian pustaka. Kerangka berpikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Ini akan digunakan sebagai landasan untuk menulis karya ilmiah dimasa mendatang.

Kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.3**  
Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas menganalisis bagaimana Tingkat Responsif Gender pada Fasilitas Ruang Publik di Taman Ahmad Yani Medan dengan menggunakan indikator (1) Empat aspek PUG, (2) 4 Prinsip gender infrastruktur “*Infrastructure for All*”, (Puslitbang Sosial,

Ekonomi dan Lingkungan tahun 2013), (3) Analisa elemen taman terhadap gender. Indikator tersebut digunakan untuk menggali data dari masing-masing informan penelitian, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dari alur kerangka berpikir tersebut, peneliti berharap dapat mengetahui Tingkat Responsif Gender pada Fasilitas Ruang Publik di Taman Ahmad Yani Medan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada permasalahan dan fakta yang dilakukan dengan cara observasi, studi literatur dan wawancara secara langsung kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta

Karya, dan Penataan Ruang (DPKPCKPR) Kota Medan, pengelola Taman Ahmad Yani Medan, dan Pengunjung Taman. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Tingkat Inklusivitas Fasilitas Ruang Publik yang Responsif Gender di Taman Ahmad Yani Medan.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian mengenai Analisis Tingkat Responsif Gender Pada Fasilitas Ruang Publik ini dilakukan di Taman Ahmad Yani yang berlokasi di Jalan Bonjol, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari akhir Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 mendatang.

### **3.3 Informan Penelitian**

Posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peran mereka sebagai sumber data. Karena mereka berada di posisi yang sama dengan peneliti, narasumber tidak hanya dapat memberikan tanggapan pada pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat lebih memilih cara memberikan informasinya. Di dalam penelitian kualitatif, sumber data manusia disebut informan. Dalam penelitian ini, informan adalah pemangku kepentingan dan pengunjung di Taman Ahmad Yani Medan, yang terdiri dari:

#### **a) Informan Kunci**

Informan yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang masalah yang diangkat oleh peneliti disebut informan kunci. Pada penelitian ini, informan kunci adalah Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Bangunan Pemerintah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (DPKPCKPR) Kota Medan.

b) Informan Utama

Informasi utama adalah individu atau kelompok yang berfungsi sebagai sumber data atau informasi penting untuk memberikan gambaran teknis tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan utama adalah pihak pengelola Taman Ahmad Yani Medan.

c) Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan pendukung adalah laki-laki dan perempuan yang mengunjungi Taman Ahmad Yani Medan.

### **3.4 Jenis Data**

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat melakukan penelitian. Yang menjadi data primer adalah data tentang Analisis Tingkat Responsif Gender Pada Fasilitas Ruang Publik (Studi Kasus Taman Ahmad Yani Medan).
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, yang

menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam analisis tingkat responsif gender pada fasilitas ruang publik di Taman Ahmad Yani Medan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadap-hadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, yang dimaksudkan untuk memungkinkan para partisipan untuk menyuarakan pendapat mereka.

2. Dokumentasi

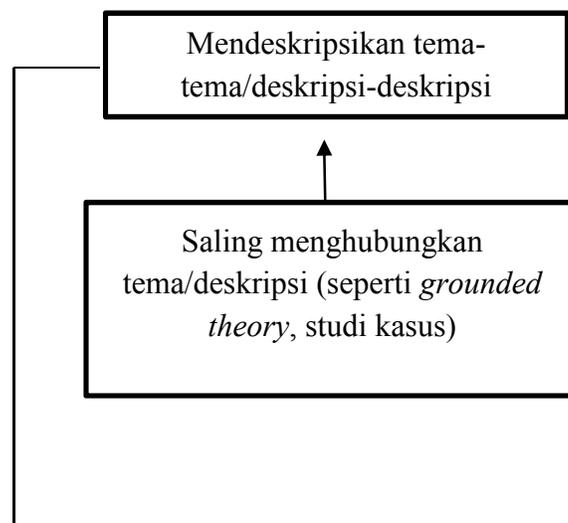
Selama penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti bahan pustaka, makalah, literatur, penelitian terdahulu, buku) ataupun dokumen privat seperti (*diary* atau buku harian, surat, *e-mail*).

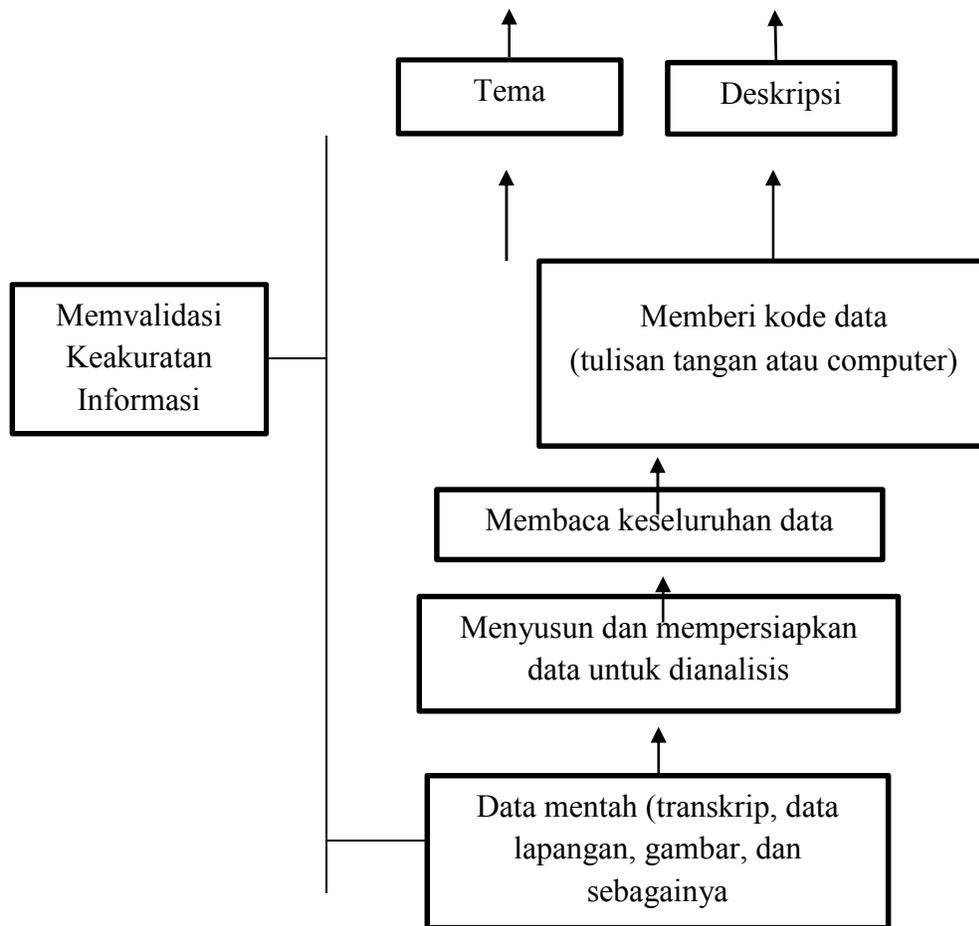
### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (John W. Creswell, 2014)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generalisasi atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis secara detail dengan meng-*coding* data. *Coding* data merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.
- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- 6) Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.





**Gambar 3.1** Teknik Analisis Data  
*Sumber: (John W. Creswell, 2014:232)*